

Nama :

No. Peserta :

Untuk soal nomor 1 s.d. 50, pilihlah jawaban yang paling tepat.

1. Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 tokoh pendiri bangsa yang memaparkan lima asas negara Indonesia merdeka yang berisi kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan yaitu
 - A. Muhammad Yamin
 - B. Ir. Soekarno
 - C. Prof. Dr. Mr. Supomo
 - D. Muhammad Hatta
 - E. Soepomo
2. Pada awal kemerdekaan Indonesia, terdapat perdebatan yang tajam tentang dasar negara karena perbedaan keinginan antara negara berdasarkan agama tertentu, paham sekuler, dan sosialisme. Namun pada akhirnya, pancasila dipilih sebagai dasar dan ideologi negara dalam situasi keberagaman ideologis tersebut karena Pancasila
 - A. merupakan ideologi yang nilai-nilainya mudah diterapkan pada masa tersebut
 - B. berfungsi sebagai identitas nasional yang menghilangkan keberagaman
 - C. menyatukan paham ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat
 - D. menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil
 - E. menjadi dokumen resmi pertama yang ditulis dalam pembukaan UUD 1945
3. Indonesia adalah negeri yang kaya. Banyaknya pulau-pulau yang membentang di Tanah Air kita menyediakan berbagai macam sumber daya alam, baik di darat maupun lautnya. Tak hanya itu, keberagaman Indonesia juga terasa dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menyimpan keberagaman suku dan budaya. Meski hidup dalam keberagaman suku dan budaya, masyarakat Indonesia tetap berusaha menjaga persatuan layaknya semboyan bangsa yang sering kita dengar, Bhinneka Tunggal Ika. Pernyataan di atas merupakan penjelasan kedudukan Pancasila sebagai
 - A. Kepribadian bangsa
 - B. Dasar negara Indonesia
 - C. Sumber dari segala sumber hukum
 - D. Pandangan hidup Indonesia
 - E. Perjanjian luhur di Indonesia
4. Pancasila sering disebut sebagai ideologi terbuka karena mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Di era globalisasi, sebagai nilai baru masuk melalui media, teknologi, dan interaksi antarbangsa. Salah satu tantangan terbesarnya adalah munculnya budaya individualisme yang berpotensi mengikis nilai gotong royong. Sebagaimana kalangan berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus menerima semua nilai global agar tidak tertinggal. Sementara itu, ada yang menilai semua nilai asing harus ditolak agar keaslian Pancasila tetap terjaga. Namun jika kedua pandangan ekstrem ini diikuti, bangsa Indonesia bisa kehilangan jati diri atau justru terisolasi dari dunia. Maka, langkah yang tepat untuk memastikan Pancasila tetap relevan sekaligus menjaga kepribadian bangsa adalah

DOKUMEN NEGARA**SANGAT RAHASIA****PENDIDIKAN PANCASILA****PAKET UTAMA (B)**

- A. Menjadikan Pancasila sekedar instrumen politik praktis bagi penguasa
 - B. Mengadopsi seluruh nilai global tanpa seleksi agar dianggap modern
 - C. Membebaskan masyarakat menafsirkan Pancasila sebebas-bebasnya sesuai dengan kepentingan
 - D. Menolak seluruh pengaruh nilai global demi menjaga kemurnian Pancasila
 - E. Menyaring nilai global sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai dasar negara
5. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini salah satu contoh nilai praksis Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
- A. Bertoleransi dengan teman sesuku
 - B. Menghargai pendapat teman seagama
 - C. Menerima hasil keputusan bersama dan menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah
 - D. Mengutamakan kepentingan pribadi dalam musyawarah
 - E. Mengutamakan semangat persatuan antar sesama agama saja
6. Persatuan Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa karna dalam sila Persatuan Indonesia mengajarkan bangsa Indonesia untuk cinta terhadap tanah airnya. Namun jika persatuan bangsa tidak dijalankan dengan prinsip demokrasi, maka
- A. Hak-hak warga negara akan tetap terjamin dengan baik
 - B. Akan munculnya ketidakadilan dan kesenjangan di masyarakat
 - C. Tidak akan timbul konflik dan perpecahan
 - D. Akan meningkatnya partisipasi masyarakat
 - E. Persatuan dan demokrasi adalah dua hal yang terpisah
7. Salah satu nilai penting dalam Pancasila adalah “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai ini menekankan pentingnya perlakuan adil bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks kebijakan pemerintah, penerapan nilai yang paling tepat adalah
- A. Memberikan bantuan sosial hanya kepada kelompok tertentu yang memiliki pengaruh
 - B. Mengembangkan program pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
 - C. Mengutamakan infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang
 - D. Menciptakan lapangan kerja yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia dengan menyerahkan sepenuhnya keinvestor asing
 - E. Menyediakan fasilitas kesehatan gratis untuk semua warga negara tanpa pengecualian
8. Saat kemajuan teknologi dan era digital yang melanda dunia sekarang ini telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Dengan demikian peluang Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan
- A. Tidak perlu lagi adanya pertemuan tatap muka di kelas
 - B. Mencari semua sumber belajar di internet agar terasa instan

DOKUMEN NEGARA**SANGAT RAHASIA****PENDIDIKAN PANCASILA****PAKET UTAMA (B)**

- C. Adanya bantuan teknologi informasi, pelajar akan mudah dalam mengerjakan tugas sehingga malas belajar
 - D. Teknologi informasi pelajar akan mudah memposting aktifitas sehari-harinya di media sosial
 - E. Bantuan teknologi informasi, kita dapat mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila dan memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat
9. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Berikut ini yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sila pertama adalah
- A. Mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan budaya
 - B. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial
 - C. Percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa
 - D. Meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
 - E. Mengembangkan sikap gotong royong dan kerjasama
10. Perhatikan pernyataan berikut ini
- 1) Menghormati hak orang lain
 - 2) Tidak merusak fasilitas umum
 - 3) Membantu korban bencana alam
 - 4) Menolak segala bentuk kekerasan, penindasan dan diskriminasi
 - 5) Mengikuti kegiatan demonstrasi di depan gedung DPR
- Berdasarkan pernyataan di atas, yang mencerminkan implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ditunjukkan oleh nomor
- A. 1, 2, dan 3
 - B. 1, 3, dan 4
 - C. 2, 4, dan 5
 - D. 1, 4, dan 5
 - E. 3, 4, dan 5
11. Indonesia telah menggunakan empat periode konstitusi (UUD), yaitu UUD (1945), Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950 dan UUD NRI tahun 1945 (plus hasil amandemen, pasca reformasi). Konstitusi RIS digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa, bernegara dan pemerintahan pada kurun waktu
- A. 18 Agustus 1945 sd 27 Desember 1949
 - B. 18 Agustus 1945 sd 17 Agustus 1950
 - C. 27 Desember 1949 sd 17 Agustus 1950
 - D. 27 Desember 1949 sd 5 Juli 1959
 - E. 5 Juli 1959 sd 20 Agustus 2002
12. Perubahan UUD NRI Tahun 1945, merupakan salah satu perwujudan tuntutan Reformasi. Dasar Pemikiran yang tidak melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
- A. Masa jabatan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang sangat lama yaitu lebih dari 20 tahun dan 30 tahun.

DOKUMEN NEGARA**SANGAT RAHASIA****PENDIDIKAN PANCASILA****PAKET UTAMA (B)**

- B. UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan Eksekutif (Presiden).
 - C. UUD NRI Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multi tafsir atau arti ganda.
 - D. UUD NRI Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat, yang mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) pada institusi-institusi kenegaraan.
 - E. Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM dan otonomi Daerah belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi.
13. Hal yang mendasari keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang melatarbelakangi berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 adalah
- A. UUDS 1950 bersifat sementara
 - B. MPR belum terbentuk
 - C. Presiden memiliki hak prerogative
 - D. Badan Konstituante dipilih pada PEMILU 1955
 - E. Badan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugas dengan baik
14. Lembaga Negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah
- A. DPR
 - B. DPD
 - C. MPR
 - D. Presiden
 - E. Mahkamah Konstitusi
15. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 tidak bisa dirubah atau di amandemen, karena merubah Pembukaan UUD sama halnya membubarkan NKRI yang di proklamasikan tgl 17 Agustus 1945. Selain Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, hal-hal yang disepakati untuk tidak dirubah berdasarkan pasal 37 ayat 5 UUD NRI 1945 adalah
- A. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - B. Masa jabatan Presiden
 - C. Lembaga-Lembaga Negara
 - D. Hak dan Kewajiban Warga Negara
 - E. Kedaulatan negara
16. Dalam situasi darurat, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh presiden mencerminkan
- A. Urgensi untuk memberikan solusi hukum cepat yang tidak dapat menunggu proses legislasi biasa
 - B. Ketidakmampuan DPR dalam menyusun Undang-Undang baru
 - C. Kebutuhan untuk mengganti semua Undang-Undang yang ada
 - D. Upaya untuk mengurangi kekuasaan Mahkamah Konstitusi
 - E. Pengabaian terhadap proses legislasi yang sudah ada

DOKUMEN NEGARA**SANGAT RAHASIA****PENDIDIKAN PANCASILA****PAKET UTAMA (B)**

17. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:

- 1) Menjamin representasi atau perwakilan kelompok berpengaruh
- 2) Mencegah dominasi kelompok tertentu
- 3) Menjamin hak mayoritas tidak berkurang akibat perlindungan minoritas
- 4) Memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai
- 5) Mendorong pembangunan yang inklusif

Berikut yang termasuk alasan pentingnya demokrasi bagi NKRI yang penuh keberagaman ditunjukkan oleh nomor

- A. 1, 2, 3
- B. 1, 3, 5
- C. 2, 3, 4
- D. 2, 4, 5
- E. 3, 4, 5

18. Salah satu perbedaan utama antar norma hukum dan norma sosial lainnya (seperti norma kesopanan, kebiasaan maupun norma adat) terletak pada sumber dan daya ikatnya. Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan tersebut adalah

- A. Norma hukum bersumber dari kebiasaan sedang norma sosial bersumber dari negara
- B. Norma hukum tidak tertulis, sedangkan norma sosial wajib tertulis
- C. Sanksi norma hukum bersifat memaksa dan dibuat oleh negara, sementara sanksi norma sosial bersifat tidak resmi
- D. Norma sosial hanya berlaku bagi sebagian orang, sedangkan hukum hanya berlaku bagi pejabat
- E. Norma hukum fleksibel dan berubah-ubah, sedangkan norma sosial bersifat kaku dan permanen

19. Dalam sebuah putusan pengadilan, hakim menjatuhkan hukuman ringan kepada terdakwa dengan alasan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan dampak sosial yang akan ditimbulkan apabila terdakwa dipenjara. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan tujuan hukum berupa

- A. Kepastian hukum
- B. Keadilan formal
- C. Ketertiban hukum
- D. Keadilan prosedural
- E. Kemanfaatan hukum

20. Tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang benar adalah

- A. UUD NRI Tahun 1945 - Ketetapan MPR - Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden – Peraturan Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kota/Kabupaten

DOKUMEN NEGARA**SANGAT RAHASIA****PENDIDIKAN PANCASILA****PAKET UTAMA (B)**

- B. Ketetapan MPR - UUD NRI Tahun 1945 - Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
- C. Undang-Undang - UUD NRI Tahun 1945 - Ketetapan MPR - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
- D. UUD NRI Tahun 1945 - Undang-Undang - Ketetapan MPR - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
- E. UUD NRI Tahun 1945 - Ketetapan MPR - Peraturan Pemerintah - Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
21. Perhatikan tahapan proses pembuatan UU yang diusulkan oleh DPD, berkaitan Undang Undang Otonomi Daerah, sebagai berikut:
- 1) DPR membahas Rancangan Undang Undang yang diajukan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR
 - 2) DPD mengajukan usul Rancangan Undang Undang kepada DPR secara tertulis
 - 3) Presiden menugasi Menteri terkait untuk membahas Rancangan Undang Undang tersebut Bersama DPR
 - 4) DPR mengajukan Rancangan Undang Undang secara tertulis kepada Presiden
 - 5) Apabila disetujui Bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya Rancangan tersebut disahkan oleh Presiden menjadi Undang Undang
- Urutan yang tepat tahapan proses pembentukan UU yang diusulkan DPD adalah...
- A. 1) - 2) - 3) - 4) - 5)
 - B. 1) - 2) - 4) - 3) - 5)
 - C. 1) - 3) - 2) - 4) - 5)
 - D. 2) - 1) - 4) - 3) - 5)
 - E. 2) - 1) - 3) - 4) - 5)
22. Lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dan membawahi empat lingkungan peradilan (umum, agama, militer, TUN) adalah
- A. Mahkamah Konstitusi
 - B. Komisi Yudisial
 - C. Mahkamah Agung
 - D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - E. Kejaksaan Agung
23. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
- A. Mahkamah Agung
 - B. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - C. Komisi Yudisial
 - D. Mahkamah Konstitusi
 - E. Presiden

DOKUMEN NEGARA**SANGAT RAHASIA****PENDIDIKAN PANCASILA****PAKET UTAMA (B)**

24. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kalimat tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Kalimat tersebut termuat jelas dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya
- Pasal 29
 - Pasal 30
 - Pasal 31
 - Pasal 32
 - Pasal 33
25. Dalam masyarakat yang heterogen, sering terjadi gesekan antar kelompok. Dari pilihan berikut yang merupakan solusi paling berkeadilan melalui pendekatan
- Mengundang pihak ketiga yang netral untuk membantu merumuskan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
 - Membiarkan konflik tersebut selesai dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah.
 - Melarang segala bentuk aktivitas budaya dari kelompok yang sedang berkonflik.
 - Memberikan hak istimewa hanya kepada satu kelompok yang dianggap paling berjasa.
 - Memaksa kelompok minoritas untuk mengikuti aturan kelompok mayoritas tanpa diskusi
26. Seorang siswa melihat temannya sedang kesulitan merapikan kursi di aula sekolah setelah acara selesai. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip gotong royong adalah
- Melaporkan kepada guru agar temannya dibantu petugas kebersihan.
 - Menonton teman tersebut sambil memberikan instruksi. Menawarkan bantuan dengan syarat temannya.
 - Mau mengerjakan tugasnya nanti.
 - Mendokumentasikan kejadian tersebut untuk dijadikan contoh di kelas.
 - Langsung ikut membantu merapikan kursi bersama-sama.
27. Seorang pengusaha yang sukses dengan sengaja mengurangi atau menghindari beban pajak seperti memalsukan laporan keuangan disebut tindakan curang terhadap pajak (*tax evasion*). Perbuatan pengusaha tadi merupakan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap UUD NRI 1945 pasal
- Pasal 27 ayat 1
 - Pasal 27 ayat 2
 - Pasal 27 ayat 3
 - Pasal 23A
 - Pasal 23
28. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, pernyataan tersebut merupakan definisi dari
- Pelanggaran hak asasi manusia
 - Pengingkaran kewajiban

DOKUMEN NEGARA**SANGAT RAHASIA****PENDIDIKAN PANCASILA****PAKET UTAMA (B)**

- C. Kewajiban warga negara
 - D. Pelanggaran hukum
 - E. Hak warga negara
29. Hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan pembukaan UUD NRI 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makna yang paling tepat dari hubungan tersebut adalah.....
- A. Pembukaan UUD NRI 1945 dapat diubah oleh MPR, sedangkan Pancasila tetap
 - B. Pancasila merupakan raga, sedangkan pembukaan UUD NRI 1945 adalah rohnya
 - C. Pancasila adalah pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD NRI 1945
 - D. Pasal-pasal UUD NRI 1945 kedudukannya lebih tinggi daripada nilai-nilai Pancasila
 - E. Pancasila hanya berfungsi sebagai simbol, sedangkan UUD NRI 1945 berfungsi sebagai hukum dasar
30. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa yang sangat besar. Keberadaan ribuan suku bangsa ini dianggap sebagai kekayaan bangsa dan bukan faktor penghambat integrasi, jika dikelola dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika karena
- A. Keragaman menciptakan persaingan budaya yang sehat untuk menentukan budaya mana yang paling unggul.
 - B. Perbedaan latar belakang budaya memberikan variasi kreativitas, perspektif, dan identitas kolektif yang memperkuat jati diri nasional.
 - C. Setiap suku bangsa diwajibkan untuk meleburkan identitas aslinya demi menciptakan satu budaya baru.
 - D. Setiap suku bangsa memiliki wilayah otonom yang tidak dapat dicampuri oleh pemerintah pusat.
 - E. Banyaknya suku bangsa memastikan bahwa Indonesia tidak akan pernah bisa dijajah kembali oleh bangsa asing.
31. Integrasi nasional pada hakikatnya adalah sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan hal tersebut integrasi nasional mengandung makna
- A. Upaya menyatukan suku bangsa, adat dan golongan
 - B. Penggabungan 2 (dua) unsur kebudayaan atau lebih
 - C. Keinginan bersatu sebagai hasrat bangsa yang merdeka
 - D. Proses mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia
 - E. Tidak ada hubungan antara berpikir dan bertindak dalam konteks interaksi budaya global
32. Salah satu alasan mengapa perbedaan suku, agama, dan budaya harus dianggap sebagai kekayaan bangsa adalah
- A. Dapat Memicu persaingan antar daerah
 - B. Menjadi daya tarik wisata dan menjadi identitas unik dimata dunia
 - C. Menghilangkan batas-batas wilayah negara
 - D. Membuat bangsa Indonesia dipecah belah
 - E. Mempercepat proses penyeragaman budaya

DOKUMEN NEGARA**SANGAT RAHASIA****PENDIDIKAN PANCASILA****PAKET UTAMA (B)**

33. Integrasi sosial sangat penting dalam mewujudkan harmoni di Indonesia, karena
- Menghapus identitas kedaerahan sepenuhnya
 - Mempersatukan berbagai kelompok menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh
 - Mendorong persaingan antar suku untuk kemajuan ekonomi
 - Untuk mempermudah pemerintah mengontrol rakyatnya
 - Agar satu agama saja yang diakui secara nasional
34. Kerjasama antarumat beragama di Indonesia sering diwujudkan dalam kegiatan sosial. Tujuan utama dari dialog antaragama dalam menjaga harmoni adalah
- Memaksa kelompok minoritas untuk mengikuti kelompok mayoritas
 - Memperdebatkan ajaran agama mana yang paling benar secara logika dan sejarah
 - Membangun kesepahaman dan rasa saling mengormati untuk mencegah terjadinya konflik
 - Mencari titik temu untuk menyatukan semua ajaran agama menjadi satu keyakinan
 - Mengurangi jumlah pemeluk agama tertentu secara persuasif
35. Keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Indonesia merupakan kekayaan bangsa, namun di sisi lain memiliki potensi konflik yang tinggi. Faktor utama yang sering kali menjadi pemicu munculnya konflik horizontal dalam masyarakat yang beragam adalah
- Munculnya sikap primordialisme dan etnosentrisme yang berlebihan terhadap kelompok sendiri
 - Adanya pembagian kerja yang tidak merata di antara anggota kelompok masyarakat tertentu
 - Kurangnya partisipasi politik dari kelompok minoritas dalam pemilihan kepala daerah
 - Adanya kemiripan tradisi antara satu suku dengan suku lainnya di wilayah yang sama
 - Terjadinya asimilasi budaya yang terlalu cepat di lingkungan masyarakat perkotaan
36. SISHANKAMRATA merupakan sistem pertahanan keamanan Indonesia yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 30 ayat 2 dengan melibatkan 3 komponen kekuatan, yaitu
- Rakyat, letak geografis Indonesia yang strategis, Pemerintah yang berdaulat
 - TNI, letak geografis Indonesia yang strategis, Pemerintah yang berdaulat
 - TNI, POLRI, Pemerintah yang berdaulat
 - TNI, Pemerintah yang berdaulat, Rakyat Semesta
 - TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama, dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung
37. Pernyataan berikut menunjukkan peran aktif Indonesia dalam hubungan internasional yang merupakan pelaksanaan politik luar negeri “ Bebas Aktif “
- Menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung.
 - Aktif mengirimkan Pasukan Garuda sebagai bagian misi perdamaian PBB.
 - Bergabung dengan aliansi militer Barat (NATO) untuk memperkuat negara dari ancaman komunis.
 - Menjadi salah satu negara pendiri ASEAN dan berperan penting untuk menciptakan stabilitas regional.

DOKUMEN NEGARA**SANGAT RAHASIA****PENDIDIKAN PANCASILA****PAKET UTAMA (B)**

- 5) Membatasi diri dalam pergaulan internasional dan fokus pada pembangunan ekonomi dalam negeri.
 Dari pernyataan tersebut, yang sesuai dengan peran Indonesia dalam hubungan internasional adalah
- 1,2,3
 - 1,2,4
 - 1,2,5
 - 2,3,4
 - 2,3,5
38. Perwujudan Hubungan Internasional yang dilakukan Indonesia, maka Indonesia aktif dalam berbagai jenis organisasi Internasional. Dibawah ini adalah organisasi Internasional yang diikuti oleh Negara Indonesia adalah
- PBB, ASEAN, OPEC, NATO
 - PBB, ASEAN, OPEC, SEATO
 - PBB, ASEAN, OPEC, APEC
 - PBB, ASEAN, APEC, SEATO
 - PBB, ASEAN, APEC, NATO
39. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia telah memainkan berbagai peran dalam upaya menjaga perdamaian kawasan, termasuk menjadi mediator dalam konflik di Kamboja dan terlibat dalam upaya perdamaian di Myanmar. Peran ini menunjukkan bahwa Indonesia berkontribusi dalam aspek
- Pembangunan ekonomi
 - Pengembangan sosial budaya
 - Penanganan lingkungan hidup
 - Keamanan regional
 - Pemenuhan hak asasi manusia
40. Asas Ius Sanguinis (hukum keturunan) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, merupakan asas utama kewarganegaraan yang di anut Indonesia. Negara berikut yang juga menerapkan asas ini adalah
- Tiongkok, Jepang, Jerman
 - Amerika Serikat, Brazil, Kanada
 - Argentina, Meksiko, Peru
 - Uruguay, Venezuela, Jamaika
 - Afrika, Belanda, Malaysia
41. PEMILU adalah suatu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
 Dibawah ini adalah tujuan diadakannya PEMILU di Indonesia, tercantum dalam nomor
- Menjaga tetap tegaknya NKRI
 - Memilih anggota lembaga legislatif
 - Memilih Presiden dan wakil Presiden dalam satu pasang.
 - Memilih anggota lembaga Yudikatif.

DOKUMEN NEGARA**SANGAT RAHASIA****PENDIDIKAN PANCASILA****PAKET UTAMA (B)**

- 5) Mewujudkan tujuan nasional.
 - 6) Memilih Badan Eksaminatif
 - A. 1,2,3,4
 - B. 1,2,3,5
 - C. 1,2,3,6
 - D. 2,3,4,5
 - E. 2,3,4,6
42. Selain Demokrasi Pancasila, dalam kehidupan bernegara, Indonesia pernah berlaku Demokrasi terpimpin, yaitu pada masa pemerintahan presiden
- A. Ir. Soekarno
 - B. Soeharto
 - C. KH. Abdurrahman Wahid
 - D. Susilo Bambang Yudhoyono
 - E. Joko Widodo
43. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) merupakan elemen yang dapat menguji ketahanan dan integritas demokrasi. Salah satu tantangan demokrasi saat ini adalah
- A. Akses ke teknologi digital
 - B. Pengembangan infrastruktur sosial
 - C. Pertumbuhan ekonomi yang merata
 - D. Kebebasan berbicara di ruang publik
 - E. Dialog dan kerja sama antarkelompok
44. Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara dari segala macam ancaman. Diantara bentuk ancaman yang dapat mengancam kedaulatan negara dibidang ideologi adalah
- A. Terorisme
 - B. Spionase
 - C. Agresi militer
 - D. Sikap hedonisme dan individualisme
 - E. Propaganda militer
45. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, maka bentuk pemerintahan yang dianut negara Indonesia adalah
- A. Kesatuan
 - B. Republik
 - C. Presidensial
 - D. Parlementer
 - E. Monarkhi
46. Perhatikan pernyataan di bawah ini:
- 1) Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
 - 2) Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif
 - 3) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau badan pemilih
 - 4) Presiden memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen

DOKUMEN NEGARA**SANGAT RAHASIA****PENDIDIKAN PANCASILA****PAKET UTAMA (B)**

- 5) Menteri negara dipilih dan bertanggung jawab kepada presiden
 Dari pernyataan tersebut, yang merupakan ciri-ciri utama pemerintahan sistem presidensial adalah
- 1, 2, 3
 - 2, 3, 4
 - 2, 3, 5
 - 1, 2, 4
 - 1, 3, 5
47. Penyebab utama antara Indonesia dengan Malaysia terkait Blok Ambalat adalah
- Perebutan wilayah daratan di Kalimantan
 - Perbedaan interpretasi batas laut dan potensi minyak bumi
 - Pelanggaran wilayah udara
 - Perebutan hak pengelolaan hutan
 - Perbedaan kebudayaan
48. Dalam pembagian kekuasaan negara, Indonesia menganut *Trias Politica* dari teori Montesquieu tetapi tidak murni karena selain lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif Indonesia juga memiliki lembaga eksaminatif. Yang dimaksud dengan lembaga eksaminatif adalah
- MPR
 - DPR
 - DPD
 - Presiden
 - BPK
49. Jika DPR menolak Rancangan Undang-Undang APBN yang diajukan presiden. Berdasarkan UUD NRI 1945, implikasi konstitusional dan tindakan DPR tersebut adalah
- Presiden wajib mengajukan APBN baru dalam masa sidang yang sama
 - Pemerintah menjalankan APBN tahun sebelumnya
 - Presiden dapat menerapkan APBN melalui PERPPU
 - MPR mengambil alih kewenangan penetapan APBN
 - Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR sementara
50. Jika terjadi sengketa hasil PEMILU yang sudah diumumkan secara resmi oleh KPU dan ada salah satu pihak yang berkeberatan terhadap hasil PEMILU tersebut, maka pihak tersebut dapat melakukan gugatan kepada
- Mahkamah Agung
 - Mahkamah Konstitusi
 - DPR
 - MPR
 - Komisi Yudisial